

## DAFTAR PUSTAKA

- Michaels, S., Goucher, N.P. & McCarthy, D. Environmental Management (2006) 38: 983.
- Gunawan. 2007. Politik Kebijakan Proses Agenda Setting Perumusan Kebijakan Pembangunan Pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. S2 Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah.
- Meijerink, S., & Huitema, D. (2010). Policy entrepreneurs and change strategies: lessons from sixteen case studies of water transitions around the globe. *Ecology and society*, 15(2), 21.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2007). Poverty, inequality and development. *Economic development*, 229-291.
- Aga, Taufan, Muhammad. 2011. Perumusan Kebijakan Pertambangan Pasir Besi di Kabupaten Bima. . Program Studi Magister Administrasi Publik UGM, Konsentrasi Governance dan Kebijakan Publik.
- Kingdon, J. 1984. *Agendas, Alternatives and Public Policies*, 2nd. ed. (New York: Harper/Collins).
- Howlett & Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- Baumgartner, T. J., Hwang, Y. H., Jones, E. H., Leung, W. H. F., Morgan, L. F., & Tu, S. C. (1993). U.S. Patent No. 5,195,086. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
- Capella, A. C. N. (2012). Translating ideas into action: The policy entrepreneur role at the public policy process.
- Böcher, M. (2016). The role of policy entrepreneurs in regional governance processes. *Entrepreneurship in the Polis: Understanding Political Entrepreneurship*, 73.
- Mintrom, M. (1997). Policy entrepreneurs and the diffusion of innovation. *American journal of political science*, 738-770.
- Peter J. May. Reconsidering Policy Design: Policies and Publics. *Journal of Public Policy* 11, 2 (1991): 187-206.
- Kingdon, J. W. (2003). *Agendas, alternatives, and public policies*. Longman Pub Group.
- Salim, Agus. (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Stake, R.E. (1978). The Case Study Method of Social Inquiry. *Dalam Educational Researcher*. No 7 (2), hal. 5-8.
- Yin, R.K. (2009). *Case Study Research: Design and Methods (Fourth Edition)*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: AlfaBeta.
- Wahyukismoyo, Heru. 2004. *Keistimewaan Jogja Vs Demokratisasi*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Purwoko, B. dan Mas'udi, W. Wakil Gubernur dan Keistimewaan DIY. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol 5 No. 2-November 2001, hal 163-182.
- Kurniadi, Bayu, D. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol 13 No. 2-November 2009, hal 190-203.
- Tolo, Emilianus. Y.S. Dari Otokrasi ke Demokrasi: Menyibak Sejarah dan Survivalitas 'Demokrasi Ala Daerah istimewa Yogyakarta. *Jurnal Humaniora*, Volume 25 No. 3-Oktober 2013, hal 270-280.



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**Variasi Policy Windows Dalam Proses Kebijakan di DIY (Studi Kasus Kebijakan Proffessor Goes to School, Kebijakan Sarjana Magang, Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus, dan Kebijakan Jaga Warga)**

NUR FAIDATI, Nur Azizah, SIP, M.SC

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

- Yuniyanto, Try. 2010. *The Process of Democratization in Yogyakarta, Indonesia, 1951-1956: A Historical Perspective*. Tawarikh: International Journal for Historical Studies.
- Suwarno P. J. 1994, Hamengku Buwono IX dan sistem birokrasi pemerintahan Yogyakarta 1942-1974, sebuah tinjauan historis, Kanisius, Yogyakarta.
- Santoso, Purwo. 2004. *Catatan Pengantar Dalam Buku Keistimewaan Jogja Vs Demokratisasi*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Dahl, Robert.A. (1956). *A Preface to Democratic Theory*. Chicago: Chicago University Press
- Ardhana, Eka, Sutirman dan Hartanto, Sulaiman. 2001. *KGPAA Paku Alam IX: Melanjutkan Sejarah di Era Demokrasi*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian Pembangunan Daerah (P3D)
- Soemardjan, Selo. 1981. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Gadjah Mada University Press.
- Roberts, Nancy C., King, Paula J. (1991): *Policy Entrepreneurs: Their Activity Structure and Function in the Policy Process*, in: *Journal of Public Administration Research and Theory* vol. 1, pp. 147-175.

## **Wawancara**

1. Wawancara dengan Staff Bidang Pemerintahan Bappeda DIY pada tanggal..29 Juli 2016.
2. Wawancara dengan Hari Dendi, Sekretaris Dewan pendidikan DIY. Wawancara dilakukan pada tanggal 7 dan 14 September 2014.
3. Wawancara dengan Danang Setiadi Kepala Seksi Kesra Bappeda DIY yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2014.
4. Wawancara dengan Prof (Em) Dr. Wuryadi yang juga adalah Ketua Dewan pendidikan DIY. Wawancara dilakukan pada tanggal 27 September 2014.
5. Wawancara dengan Ibu Anna Widyawati, Kasubbid Aparatur, Hukum dan Politik Bappeda DIY. Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2015.
6. Wawancara dengan staff Bagian Statistik Sosial BPS DIY, Bapak Warno. Wawancara dilakukan pada tanggal 1 September 2014.
7. Wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Bapak Bachtiar. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 November 2014.
8. Wawancara dengan Bapak Taufiq AR, Staff Bidang Aparatur, Hukum dan Politik, Sub Bidang Pemerintahan Bappeda DIY. Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2015.
9. Wawancara dengan Ibu Finna Widyastuti. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 November 2014.

## **Laporan dan sejenisnya**

1. TOR *Proffessor Goes to School* yang diterbitkan oleh Dewan Pendidikan DIY
2. Profil DIY Tahun 2015
3. Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Jaga Warga
4. Berita Resmi Statistik BPS Provinsi DIY NO. 05/01/34/Th.XV, 02 Januari 2013.
5. Laporan Monitoring dan Evaluasi, Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2013.
6. Pedoman Pelaksanaan Jaga Warga
7. Laporan Kajian *Community Police (COP)*

## Website

<http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/14899>  
[monevapbd.jogjaprovgoid](http://monevapbd.jogjaprovgoid)

## Regulasi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Sarjana Magang.
4. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi DIY.
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2013.
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013.
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9 tahun 2015 tentang jaga warga.